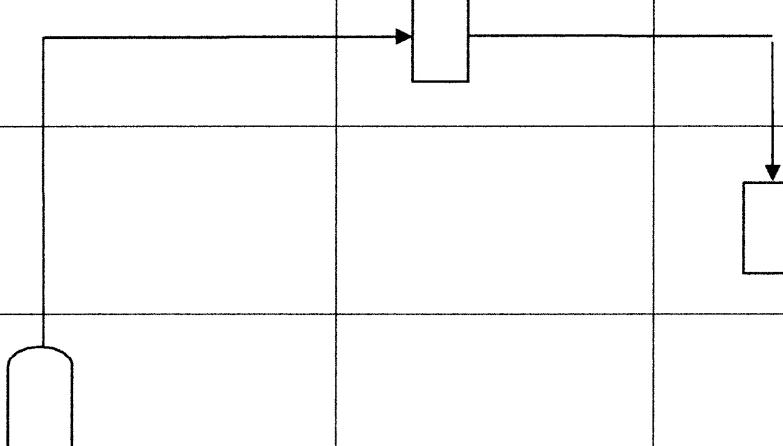
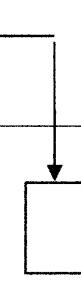


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p>		<p>NOMOR SOP : 000.8.3.3/501/DKIPS/VII/2024</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 29 September 2020</p> <p>TGL. REVISI : 18 Juli 2024</p> <p>TGL. EFEKTIF :</p>	
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI</p>		<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>RUBY HARRIS, S.T.</p> <p>PENGERIWAH DAN STAFFISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>RUBY HARRIS, S.T.</p> <p>PENGERIWAH DAN STAFFISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>RUBY HARRIS, S.T.</p> <p>PENGERIWAH DAN STAFFISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>RUBY HARRIS, S.T.</p> <p>PENGERIWAH DAN STAFFISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p>	<p>DISAHKAN OLEH :</p> <p>RUBY HARRIS, S.T.</p> <p>PENGERIWAH DAN STAFFISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>RUBY HARRIS, S.T.</p> <p>PENGERIWAH DAN STAFFISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p>RUBY HARRIS, S.T.</p> <p>PENGERIWAH DAN STAFFISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Diploma dan Sarjana SLTA/SMA/Sederajat Mampu mengoperasikan komputer 	
<p>KETERKAITAN :</p>		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lembar Kerja dan Rencana Kerja CPU Printer Alat tulis kantor Jaringan internet 	
<p>PERINGATAN :</p> <p>Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi Teguran Lisan atau Tertulis dari atasan secara berjenjang.</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy</p>	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
		Pemohon Informasi	PPID Utama dan PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
	<p>Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi tere registrasi dan diberikan. Perpanjangan informasi pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.</p> <p>1.</p> 					<p>1) Formulir Pengajuan keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh;</p> <p>2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan</p>	<p>Pada hari kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi tere registrasi</p>	Berkas Permohonan yang disi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)
	<p>Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk Mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi, yang dibentuk Oleh PPID Utama</p> <p>2.</p>							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan
	<p>Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh Utama dan PPID beranggotakan</p> <p>3.</p> 							14 (empat belas) hari kerja setelah

		diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID	
4.	<p>Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan penanganan proses sengketa informasi kepada atasan PPID.</p>	<p>Informasi dokument diminta oleh pemohon informasi</p> 	<p>Perpanjangan atau yang diminta oleh pemohon informasi adalah 7 hari kerja.</p>
5.	<p>Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.</p>		